

PERAN WKSBM DAN PUSKESOS DALAM PENGUATAN PRANATA-PRANATA SOSIAL PERDESAAN

Rusmin Turnanggor

Abstract : Institutional spacecraft Community Based Social Welfare (WKSBM) has amounted to eight thousand in Indonesia that spread in various villages and village located in Indonesia. This is the institutions WKSBM Drun rembug centers and efforts for various program activities institutions that have found social advance in both the rural social order of the pure form of residents of local villages or village or at the instigation and government facilities. To realize variations larger programs and equitable to the members is required WKSBM the birth of a great arcade form dilakukannya the WKSBM the various activities of the institutions which became members. Arcade was named the center of social welfare (Puskesmas). If a member is the messenger WKSBM / representatives of all institutions that have existed, while the members consisted of members Puskesmas and if necessary WKSBM added from each of the supporting institutions. Thus the social institutions which have rural local wisdom and even the more robust, dynamic, and integrated in the activities. On this basis, the village government or urban villages in developing stronger development of its citizens. As propisi hypothesis "the whole Puskesmas in WKSBM and mendistribisikan efforts and programs to its members will be more robust rural social security-related". How the process can be followed in the description of this article.

Keyword : *center for social welfare, social institution, social capital, social resilience in village.*

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari ± 17.000 pulau yang terbentuk dari 34 Provinsi dan didukung oleh 450 Kabupaten dan Kota serta disangga dengan ± 3600 Kecamatan sembari diperkuat ± 36.000 Desa dan Kelurahan. Di dalam ini tersimpan potensi besar yaitu ± 441 Suku Bangsa dengan ± 553 rumpun bahasa yang menjadi akar Bahasa Indonesia (Melalatoa, 1995). Kekuatan Persatuan Bangsa kita merupakan

rajan kesatuan-kesatuan yang terdapat pada Suku-Suku Bangsa ini sehingga bernama NKRI. Ketika kesatuan-kesatuan ini terguncang seperti pada bencana sosial berupa kerusuhan tahun 1998 hingga tahun 2003 walau pun hanya Aceh, Sambas, Sampit, Ambon, Ternate dan Sekitarnya, serta Poso, keamanan dan ekonomi serta kerukunan Indonesia cukup rentan. Sebaliknya ketika pranata-pranata yang terdapat di masing-masing Suku-Suku Bangsa tersebut menguasai kembali karifan lokal mereka, dibantu kesadaran, tanggungjawab dan kendali diri

pemerintah, kegagalan itu dapat dipulihkan secara berangsur-angsur. Berlatar fenomena ini dalam upaya pembangunan negara seyogianya diutamakan (deretan prioritas terdepan bukan suplemen atau komplement) pemberdayaan pranata-pranata masyarakat desa dan kelurahan melahirkan keorganisasian kolektif. Dapat diberi nama Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang jumlah dan mutunya terus didorong dan dibimbing. Berfungsi menjadi sentra koordinasi dan konsultasi need assesment sampai pada penyusunan program. Kemudian diperkokoh sanggar kegiatan promotif, edukatif dan produktif di berbagai bidang kehidupan. Sanggar tersebut bisa diberi nama Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS). Pusat ini mengaktualkan program pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan agama, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, keorganisasian sosial, pembinaan bahasa dan komunikasi serta kesenian. Penguatan pranata lokal ini di samping penumbuhan pranata bentukan pemerintah, bertujuan mengantar warga masyarakat berperan kompetitif meraih akses transformasi kehidupan dari lokal, regional, nasional hingga internasional (Tumanggor Cs, 2004: 35-45).

II. CIRI-CIRI PERDESAAN DAN MODAL SOSIAL BAGI LATAR PEMBERDAYAAN PUSKESOS

1. Kebutuhan sosial (*Social Needs*)

Kebutuhan sosial merupakan suatu keadaan dimana kualitas hidup minimal seyogianya dipenuhi dan apabila standar itu tidak tercapai berarti terjadi masalah sosial. Syahrir rrianya takan bahwa kebutuhan pokok pada rumah tangga mencakup: kesehatan, pendidikan, pangan, persediaan air, angka kematian bayi, dan sanitasi (Sutomo 2006: 360); Sementara itu

Sumardi dan Evers (1982) mengemukakan kebutuhan dasar manusia meliputi: makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, partisipasi sosial, perabotan dasar rumah tangga, lapangan pekerjaan dengan upah yang sesuai dengan jam kerja, rekreasi, tabungan hari tua.

Kebutuhan sosial dari segi kewilayahan adalah terdapatnya lahan sumber ekonomi masyarakat, sarana dan prasarana: jalan, komunikasi serta penerangan, pasar, agama, pendidikan, kesehatan, air bersih, kebudayaan, manajemen pemerintahan setempat.

Kebutuhan sosial dari segi modal sosial dasar terjadinya pertumbuhan dan perkembangan kearifan dan pranata lokal dalam pembangunan masyarakat, terdapatnya keamanan, kesejahteraan kehidupan sesama yang setara secara proporsional, tertanganinya kehidupan lanjut usia, putus sekolah, anak nakal, gelandangan, anak terlibat narkoba/napza, anak terkebelakang mental, dan terpeliharanya keasrian lingkungan, berfungsinya nilai dan norma penapis budaya asing yang tidak relevan. Tidak juga terguncang dengan resesi ekonomi nasional dan dunia atas kemandirian dalam mengelola sumberdaya kehidupan lokal.

2. Sumberdaya (*Resources*)

Sumberdaya adalah kekuatan (*power*), potensi (kecambah bagi pertumbuhan dan perkembangan) yang bisa dimanfaatkan dalam menangani permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat. Potensi itu meliputi: sumber daya alam (*natural resources*); sumberdaya manusia (*human resources*), sumberdaya kelembagaan (*institutional resources*) baik formal (resmi) maupun non formal (tradisional).

3. Modal Sosial (*Social capital*)

Dalam sejumlah literature ilmu sosial, modal sosial (*social capital*) memiliki banyak

pengertian. Seragaldin dan Grottaert (1999) memproposisikan: "*Sosial capital generally refers to the set of norms, networks, and organization through which people gain access to power and resources that are instrumental in enabling decision making and policy formulation*". Di samping itu Fukuyama (2000) menekankan pengertian sosial capital sebagai seperangkat nilai-nilai internal atau norma-norma yang disebarkan diantara anggota-anggota suatu kelompok yang mengizinkan mereka untuk bekerjasama antara satu dengan yang lainnya. Ditekankannya prasyarat utama dalam sosial capital adalah kepercayaan (*trust*), kejujuran (*honesty*), dan keuntungan timbal balik (*reciprocity*). Sementara itu world bank (1999) menekankan "*sosial capital refers to institutions, relationship and norms that shape the quality of society's interaction*". Berarti kata kunci dalam modal sosial adalah: saling percaya, kejujuran, dan timbal balik serta kehangatan interaksi menjadi acuan untuk menganalisis keberhasilan WKSBM dalam menghidupkan serta memberdayakan puskesmas dalam menguatkan kehidupan masyarakat.

4. Daerah tertinggal/terpencil (*Remote area/backward/underdevelop district*)

Suatu daerah atau desa dikategorikan tertinggal, karena ciri (1) Secara geografis, relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi; (2) dari sisi sumberdaya alam, tidak memiliki potensi, atau memiliki sumberdaya alam besar namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi, dan daerah tertinggal akibat eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan; (3) dari sisi sumberdaya manusia, umumnya masyarakat di daerah

tertinggal, tingkat pendidikan, pengetahuan, dan ketrampilannya relatif rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang; (4) keterbatasan prasarana dan sarana, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang menyebabkan kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial; (5) seringnya (suatu daerah) mengalami bencana alam dan konflik sosial yang berakibat terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi; dan (6) suatu daerah menjadi tertinggal disebabkan oleh beberapa kebijakan yang tidak tepat seperti kurang menaruh perhatian pada pembangunan daerah tertinggal, kesalahan pendekatan dan prioritas pembangunan, serta tidak melibatkan kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan (Direktorat Kawasan Khusus Dan Daerah Tertinggal, Bappenas, 2006).

Pengembangan daerah tertinggal perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Setidaknya dapat dilakukan melalui strategi; (1) pengembangan ekonomi lokal, yang diarahkan untuk mengembangkan ekonomi daerah tertinggal dengan didasarkan pada pendayagunaan potensi sumberdaya lokal (sumberdaya manusia, sumberdaya kelangkaan, serta sumberdaya fisik) yang dimiliki masing-masing daerah, oleh pemerintah dan masyarakat, melalui pemerintah daerah maupun kelompok-kelompok kelembagaan berbasis masyarakat yang ada; (2) pemberdayaan masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial, budaya ekonomi dan politik; (3) perluasan keserngapan, strategi ini diarahkan untuk membuka keterisolasian daerah tertinggal agar mempunyai keterkaitan dengan daerah maju; (4) peningkatan kapasitas, strategi ini diarahkan untuk meningkatkan

kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia pemerintahan dan masyarakat di daerah tertinggal; dan (5) peningkatan mitigasi, rehabilitasi, strategi ini diarahkan untuk mengurangi resiko dan memulihkan dampak kerusakan yang diakibatkan oleh konflik dan bencana alam serta berbagai aspek dalam wilayah perbatasan (Direktorat Kawasan Khusus Dan Daerah Tertinggal, Bappenas, 2006).

Pembangunan daerah tertinggal tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya dan keamanan (bahkan menyangkut hubungan antara daerah tertinggal dengan daerah maju). Disamping itu kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di daerah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan yang besar dari pemerintah.

Dalam Rencana Pembangunan: Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 salah satu visinya adalah mewujudkan perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh berkelanjutan. Sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka ditetapkan agenda pembangunan untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia dengan prioritas (lima) sasaran pokok yakni: (a) mengurangi jumlah penduduk miskin dari 16,6% pada tahun 2004 menjadi 8,2% pada tahun 2009 dan terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka dari 9,5% pada tahun 2003 menjadi 5,1% pada tahun 2009; (b) berkurangnya kesenjangan antar wilayah; (c) meningkatnya kualitas manusia secara menyeluruh; (d) membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam yang mengarah pada pengarusutamaan (*mainstreaming*) prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan; dan (e) membaiknya infrastruktur (RPJM Nasional 2004-2009).

5. Renstra Depsos RI 2004-2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Departemen Sosial menjabarkan RPJM 2004-2009 kedalam Keputusan Menteri Sosial RI No. 102/HUK/2005 tentang Rencana Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial 2004-2006 Departemen Sosial RI. Tujuan disusunnya Rencana Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai amanat UUD 1945 dengan memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya (Renstra Pembangunan Kesejahteraan Sosial 2004-2009; 2007)

Fokus masalah sosial yang menjadi prioritas Departemen Sosial adalah kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan, keterpencilan/ ketertinggalan, akibat bencana alam dan bencana sosial. Adapun hasil pembangunan kesejahteraan sosial selama 2001-2004, menunjukkan bahwa Departemen telah mampu: (1) menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi mengenai kesetaraan dan keadilan gender, pengkajian kebijakan pembangunan masalah gender; (2) pemberdayaan perempuan di daerah melalui bantuan teknis dan peningkatan keterampilan serta pengembangan kapasitas kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE) bagi wanita rawan ekonomi.

Sedang tantangan permasalahan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2008-2009 meliputi: (1) Integrasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dengan pembangunan lainnya; (2) Pelayanan Sosial dengan prioritas pada pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*) dan prioritas pada masalah (*problem*) melalui pendekatan selektivitas; (3) pelayanan pengembangan (*Development Service*); Pendekatan desentralistik sesuai UU

Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 (bottom up, dimana provider berperan sebagai fasilitator, pengembangan pelayanan sosial dengan mengandalkan modal sosial "social capital" dari potensi masyarakat).

Sejak tahun 2005 perkembangan jumlah penduduk miskin di Indonesia cenderung berkembang pesat, salah satunya disebabkan terjadinya bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir dan angin puting beliung). Oleh karena itu sebagai upaya pengembangan pelayanan sosial di daerah rawan bencana dengan mengandalkan modal sosial *social capital* maka Departemen Sosial RI perlu menyusun suatu Standar Pelayanan Sosial Minimal (SPSM) terhadap korban bencana alam dengan prioritas pada pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) dan prioritas pada pemecahan masalah (problem solving) melalui pendekatan partisipatif dan selektivitas.

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal dalam pengelolaan bencana alam (disaster management) sesuai dengan tahapan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial No.57/ BJS/ 2003 tentang "Pedoman Umum Pelaksanaan Program Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial", yaitu (1) Kesiapsiagaan dan Mitigasi; (2) Tanggap Darurat Bencana Alam; (3) Rehabilitasi Bencana Alam; (4) Resosialisasi dan Rujukan Korban Bencana Alam melalui penelitian secara multiyears dengan tahapan penelitian sebagai berikut: Tahun I Kajian tentang Pemetaan Masalah Bencana Alam di Daerah Rawan Bencana Alam, Tahun II Penyusunan Konsep "Model Pemberdayaan di Daerah Rawan Bencana"; Tahun III Uji coba Konsep Model Pemberdayaan di Daerah Rawan Bencana; Tahun IV Replikasi Model pemberdayaan di Daerah Rawan Bencana.

Sebagai awal penyusunan " Standar pelayanan Minimal di Daerah Rawan Bencana" maka peneliti Puslitbang kessos untuk tahun 2009 akan melaksanakannya dengan tema: (1) permasalahan kesejahteraan sosial di daerah rawan bencana; (2) kebutuhan pelayanan bagi korban bencana dan (3) potensi sosial dan alam yang dapat didayagunakan untuk penanggulangan bencana (*disaster management*). Hasil yang diharapkan dari penelitiannya adalah:

1. Peta permasalahan sosial yang berkaitan penanggulangan bencana alam (tahapan kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan resosialisasi)
2. Peta kebutuhan pelayanan bagi korban bencana alam (tahapan kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan resosialisasi)
3. Potensi sosial dan alam (tahapan kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan resosialisasi)

Dari deskripsi besar RPJM Tahun 2002-2009 tersebut dan Renstra Depsos, sebahagian relevan menjadi bahan penting bagi WKWSBM dalam menggerakkan hingga pemberdayaan Puskesmas dalam Desa-Desa terkait sehingga terukur hasilnya dan sejalan dengan visi, misi, tujuan dan program Depsos RI. Sekarang Dalam Pemerintahan Presiden SBY dan Kabinet Indonesia Bersatu II Priode Tahun 2009 - 2014, WKWSBM harus lebih memperkuat jaringannya dengan pranata-pranata sosial baik muhimi bentuk pemerintah. Kemudian mendirikan Puskesmas sebagai sanggar dan pilar utama dari WKWSBM mencari, mendapatkan, serta mendistribusikan program kegiatan yang relevan bagi pranata-pranata anggota penyangga WKWSBM dan program besar yang dilaksanakan sendiri oleh WKWSBM

sebagai pranata terbesar dari semua pranata yang ada di desa atau kelurahan. Dengan demikian pelbagai permasalahan yang harus dipecahkan dan inovasi pembangunan dari kalangan ilmuwan, pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat akan mudah terserap oleh warga desa sehingga memperkuat ketahanan masyarakat terkait.

III. PERSPEKTIF PUSKESOS DI DESA/KELURAHAN

Sebagaimana kita fahami, bahwa Pusat kesejahteraan sosial (Puskesmas) adalah semacam Sanggar Besar sentra Kegiatan dari Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang dipusatkan di kelurahan atau desa yang berfungsi sebagai penguatan pranata-pranata yang telah ada.

Pengertian pranata sudah dikonsepsikan melalui Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 12/HUK/ 2006 sbb: Pranata sosial adalah suatu sistem nilai dan norma yang mengatur tata hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pranata sosial berfungsi sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku menghadapi permasalahan kehidupan dalam masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat (integrasi), sebagai kontrol sosial.

Sesungguhnya definisi konsep ini sudah benar, hanya ada sedikit ketinggalannya yaitu tidak mencantumkan wahana yang jadi sentra acuan dinamika keberlangsungan aktivitas warga masyarakat memerankan nilai dan norma tersebut yaitu keorganisasian sosial. Karena itu penulis menawarkan definisi konsep pranata itu sebagai berikut: Pranata sosial merupakan sistem nilai dan norma yang berwujud pada pendirian organisasi sosial sebagai sentra warga masyarakat memerankan hak dan kewajiban masing-

masing ketika mengimplementasikan nilai dan norma tersebut sebagai acuan kehidupan bersama memenuhi kebutuhan mencapai kesejahteraan.

Tujuan pendirian WKSBM dengan sanggar besarnya Puskesmas adalah agar pranata-pranata yang terdapat di masyarakat seperti Karang Taruna, PKK, Kelompok Pengajian, dan lain-lain, di samping memiliki program masing-masing juga mempunyai kegiatan bersama lintas pranata yang ada, ketika terhimpun dalam kegiatan WKSBM yang diaktualisasikan dan didistribusikan pada Puskesmas. Hal ini mencerminkan komunikasi antar kelompok aktivitas sosial warga menjadi akrab, hangat, harmonis, dan efektif yang dimulai dari idea utopis melangkah ke aktualitas.

IV. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Tadi sudah disinggung, bahwa kelembagaan masyarakat di desa cukup banyak. Ada yang dibentuk atas bimbingan pemerintah seperti PKK, Karang Taruna, Posyandu, dan ada pula yang didirikan sesuai kebutuhan masyarakat dalam menghadapi masalah keseharian mereka seperti Kelompok Yasinan, Perkumpulan Fardhu Kifayah, dan Siskamling. Kelembagaan-kelembagaan ini tentu akan terus kuat dan berkembang, apabila WKSBM terus dapat merapat kepada mitra kerja baik ke tingkat kecamatan, kabupaten/ kota, bahkan ke provinsi serta ke dinas-dinas lintas departemen yang dapat kontinyu membimbing, membantu kegiatan, menopang dana, bantuan permodalan serta advokasi hak dan kewajiban anggota puskesmas yang terorganisir dalam WKSBM.

Pranata sosial asli lokal dan pranata yang difasilitasi pemerintah inilah yang mendukung atau sebagai keberangkatan

penyangga terbentuknya WKSMB dan sekaligus yang akan mengisi wadah Puskesmas ke depan. Dengan demikian perlu dalam pengembangan program WKSMB dan Puskesmas menghidupkan juga kelembagaan-kelembagaan atau pranata tersebut pada PJPM 2010-2014 ke depan.

V. TEHNIK MENGERAKAN PUSKESOS

Teknik-teknik yang perlu dilaksanakan dalam menggerakkan Puskesmas, adalah:

1. Motivasi, bimbingan dan fasilitasi Keperawatan Pelayanan Sosial untuk mengirimkan wakil-wakil mereka duduk membentuk WKSMB
2. Motivasi, bimbingan dan fasilitasi WKSMB melahirkan Puskesmas
3. Motivasi, bimbingan dan fasilitasi Puskesmas melakukan Need Assessment dan melahirkan Program serta mewujudkan berbagai kegiatan terkait kesejahteraan sosial
4. Sama-sama dalam menentukan Standar Monitoring dan Evaluasi atas proses dan hasil kegiatan WKSMB dan Puskesmasnya terkait ketahanan sosial
5. Metode dan Teknik Fokus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) masih lebih terjamin hasilnya daripada penawaran pemikiran para ahli yang tidak diaharni masyarakat WKSMB.
6. Program-Program yang ditujukan ke masyarakat yang tidak terkait langsung dengan Program WKSMB dan Puskesmasnya namun karena adanya keaktifan WKSMB di wilayah tersebut, perlu diinformasikan kepada WKSMB sehingga mereka memahami

adanya kegunaan WKSMB dan Puskesmas di wilayah tersebut.

7. Membangun Siripatik Keperawatan Pelayanan Sosial, WKSMB dan Puskesmas Kepada Aparat Pemerintah (a) bangun komunikasi yang hangat dan terbuka secara wajar, (b) membantu solusi atas kesulitan yang dihadapi mereka, (c) tunjukkan kejujuran yang tinggi dalam mengayomi mereka, (d) bijak dalam mengkritik dan menawarkan sesuatu dan (e) sabar dan taktis dalam hadapi ketimpangan serta penyimpangan

VI. KEBERHASILAN WKSMB

Ciri-ciri keberhasilan WKSMB dalam membangun masyarakat desa/ kelurahan

1. WKSMB melahirkan program dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan kegiatan dan program dari seluruh keperawatan pelayanan sosial yang terdapat di masyarakat tersebut;
2. WKSMB dapat mewujudkan sejumlah program besar atau prestisius (bergengsi) yang diselenggarakan oleh Puskesmas
3. WKSMB semakin memperluas jaringan hubungan antar Keperawatan Pelayanan Sosial yang terdapat dalam masyarakat
4. Terdapat pengayaan warga anggota dari masing-masing keperawatan pelayanan sosial di bidang sosial, ekonomi, agama, komunikasi, dll.
5. Lambat laun berkurang ketergantungan WKSMB dan Puskesmas kepada Pemerintah dan LSM menjadi berkurang berganti dengan kemandirian usaha dan percaya diri sendiri.

6. Terbuka komunikasi dengan dunia luar dalam pemenuhan berbagai kebutuhan WKSBM dan Puskesmasnya dengan tidak mengalami reduksi kemanclirian, kepribadian serta adat istiadat lokal yang masih baik.
7. Semakin terbuka hubungan desa/kelurahan dengan desa/kelurahan lainnya atau kecamatan bahkan kabupaten/kota atas eksistensi WKSBM dan Puskesmasnya dan terhindar dari kebablasan.

VII. KEBERHASILAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN WKSBM

Ciri-Ciri Keberhasilan Pemerintah (Depsos dll) Dalam Membina WKSBM Mewujudkan Puskesmas, adalah :

1. Terlapatnya data yang lengkap tentang masalah dan kemajuan WKSBM dan Puskesmas pada Pemerintahan (Desa, Kecamatan dan Kabupaten)
2. Adanya program Pemerintah (Depsos dll) yang terus menerus menjembatani kemajuan program dan kegiatan WKSBM dan Puskesmas
3. Terdapatnya koordinasi antara LSM dengan pemerintah dalam pengembangan WKSBM dan Puskesmasnya.
4. Terlapatnya keharmonian komunikasi antara perangkat Pemerintahan, LSM dan WKSBM dan Puskesmasnya.
5. Aparat Pemerintahan Dapat menjaga ciri sehingga benar-benar program yang semula ditujukannya untuk pengembangan WKSBM dan Puskesmas tepat sasaran atau tidak disimpangkan.
6. Tanamkanlah bahwa keberhasilan WKSBM dan Puskesmasnya adalah ciri keberhasilan Pemerintah menggerakkan masyarakat demikian sebaliknya.

VIII. PENUTUP

Dengan keberhasilan Depsos dan Pemda setempat membina lahirnya WKSBM berperan menghidupkan dan menggerakkan Puskesmasnya dalam masyarakat khususnya Desa atau kelurahan, akan menambah komponen ketahanan sosial dalam masyarakat. Sebagai proposisi hipotesisnya "*semakin utuh WKSBM dan Puskesmas dalam meng-upayakan dan mendistribusikan program terhadap anggotanya akan semakin kokoh ketahanan sosial masyarakat pedesaan terkait*" Karena itu upaya meningkatkan dan mendinamisasi WKSBM dan Puskesmas dalam penguatan kearifan lokal serta mengarahkan sejumlah aktivitas program menanggulangi Penyalang Masalah Kesejahteraan Sosial perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan sebanyak mungkin instansi dan lembaga terkait (*stakeholders*) sebagai mitra. Semoga tulisan ini bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahransyaf, Dauci, dkk (2007), *Pemetaan Pranata Sosial Pada Komunitas Lokal*, Jakarta: Terbitan Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Badan Penelitian dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial
- Departemen Sosial RI, (2004), *Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 42/HUK/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan*

- Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)*. Direktorat Peningkatan Peran Kelembagaan Sosial Masyarakat Dan Kemitraan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI.
- (2004), *Pola Jejaring Kerja: Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)*. Direktorat Peningkatan Peran Kelembagaan Sosial Masyarakat Dan Kemitraan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI.
- (2005), *Panduan Pengembangan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat*. Direktorat Peningkatan Peran Kelembagaan Sosial Masyarakat Dan Kemitraan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI.
- (2006), *Kebijakan Operasional Pemberdayaan Sosial Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat (WKSBM)*. Direktorat Peningkatan Peran Kelembagaan Sosial Masyarakat Dan Kemitraan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI.
- (2006), *Keputusan Menteri Sosial RI No.12/H UK/2006 Tentang: Model Pemberdayaan Pranata Sosial Dalam Masyarakat Berketahanan Sosial*. Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial.
- Hikmat, Harry, (2004), *Dimensi Indikator Ketahanan Sosial Masyarakat (Potret di Empat Lokasi)*. Jakarta: Terbitan Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat. Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial RI
- Melalatoa, Yunus, (1995), *Ensiklopedi Suku Bangsa Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Depdikbud RI
- Midgley, James, (2005), *Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta : Terbitan Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam (Ditperta Islam) Depag RI.
- RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2004-2009, (2005), *Peraturan Presiden RI Nomor 7 tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Soeriaatmadja, Irmayani, (2002), *Kohesivitas Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pada Masyarakat miskin Ditinjau dari Komunikasi Interpersonal Dan Penyesuaian Diri: Studi Kasus pada KSM di kamal Jakarta Utara*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Volume 7 Nomor 02 Juni 2002
- Tumanggor, Rusmin, Cs (2004), *Konflik Dan Modal Kedamaian Sosial Dalam Konsepsi Kalangan Masyarakat Di Tanah Air*. Jakarta: Terbitan Lemlit UIN Syarif Hidayatullah dan Bala tbangsos Depsos RI.
-
- Prof. Dr. Rusmin Tumanggor, MA**, adalah Guru Besar Antropologi Kesehatan pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Anggota Forum Pakar Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Anggota Panitia Pembina Ilmiah pada Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, dan konsultan penelitian pada Puslitbang Kesejahteraan Sosial.